1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan daerah yang tidak memiliki pengukuran inflasi melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) secara mandiri. Oleh karena itu, perkembangan tekanan inflasi daerah dianalisis berdasarkan perkembangan harga kebutuhan pokok dan barang penting, kondisi stok, serta kelancaran distribusi.

Pada Triwulan III Tahun 2026, tekanan terhadap stabilitas harga di Kabupaten Mahakam Ulu terutama dipengaruhi oleh kemarau panjang yang berdampak terhadap penurunan muka air Sungai Mahakam dan kelancaran transportasi serta distribusi barang, khususnya menuju wilayah hulu.

Berdasarkan Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor 300.2/K.103/2026, telah terjadi bencana hidrometeorologi kekeringan fluvial yang mengakibatkan gangguan transportasi sungai, kendala distribusi kebutuhan pokok dan kelangkaan logistik di Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai. Kondisi tersebut diperkuat oleh laporan BMKG Provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan curah hujan pada umumnya berada pada kategori rendah, yaitu 0–50 mm. Status Siaga Darurat ditetapkan selama 7 hari, mulai 19 sampai dengan 25 Agustus 2026.

Perkembangan harga

Pada awal Triwulan III, harga sejumlah komoditas di Mahakam Ulu sudah berada pada tingkat relatif tinggi.

Pada minggu pertama Juli 2026, harga di Mahakam Ulu antara lain:

- Beras medium: Rp21.000/kg;
- Beras premium: Rp22.000/kg;
- Cabai rawit merah: Rp100.000/kg;
- Bawang merah: Rp61.500/kg;
- Bawang putih: Rp51.500/kg.

Harga tersebut masih bertahan pada minggu kedua dan ketiga Juli. Pada minggu terakhir Juli, cabai rawit merah tetap berada pada Rp100.000/kg, bawang merah Rp61.500/kg, dan bawang putih Rp51.500/kg.

Memasuki Agustus, kondisi harga masih menunjukkan tekanan. Pada minggu pertama Agustus, cabai rawit merah tetap berada pada Rp100.000/kg, bawang merah Rp61.500/kg, dan bawang putih Rp51.500/kg.

Pada minggu keempat Agustus, terdapat sedikit penurunan pada beberapa komoditas, yaitu:

- Cabai rawit merah: dari Rp100.000 menjadi Rp85.000/kg atau turun 15%;
- Beras medium: dari Rp21.000 menjadi Rp20.000/kg atau turun 4,8%.

Namun pada periode yang sama, harga daging ayam ras meningkat menjadi Rp65.000/kg dan ikan layang menjadi Rp60.000/kg.

Pada minggu pertama September, harga Mahakam Ulu kembali relatif stabil. Cabai rawit merah bertahan pada Rp85.000/kg, bawang merah Rp60.000/kg, dan bawang putih Rp50.000/kg. Kinerja pengolah data Mahakam Ulu pada minggu tersebut juga tercatat 100%.

Kondisi harga dan stok di Long Apari

Pemantauan langsung Kecamatan Long Apari pada 15 Juli 2026 menunjukkan kondisi harga yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang akses distribusinya lebih mudah.

Beberapa komoditas yang tercatat antara lain:

Komoditas	Harga
Beras premium 25 kg	Rp650.000/sak
Beras premium 10 kg	Rp250.000
Beras premium 5 kg	Rp200.000
Gula pasir	Rp30.000/kg
Minyak goreng 5 liter	Rp200.000
Minyak goreng 1 liter	Rp40.000
Cabai merah besar	Rp95.000/kg
Cabai keriting	Rp90.000/kg
Cabai rawit	Rp100.000/kg
Bawang merah	Rp80.000/kg
Bawang putih	Rp80.000/kg
LPG 3 kg	Rp200.000/tabung
LPG 12 kg	Rp650.000/tabung

Dari sisi stok, Kecamatan Long Apari menyampaikan bahwa ketersediaan barang pada saat pemantauan diperkirakan hanya mampu memenuhi kebutuhan sekitar satu minggu. Apabila kemarau berlangsung lebih panjang, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penurunan stok, kenaikan harga, bahkan kelangkaan.

Kondisi harga akibat gangguan distribusi

Per 10 Agustus 2026, hasil pemantauan pemerintah daerah menunjukkan harga beras ukuran 25 kg berada pada kisaran Rp750.000–Rp850.000 per sak, dibandingkan kondisi normal sekitar Rp550.000–Rp600.000. Harga gula meningkat menjadi Rp30.000/kg, minyak goreng Rp45.000/liter, telur Rp7.000/butir, LPG 3 kg sekitar Rp300.000/tabung, LPG 12 kg Rp700.000/tabung dan BBM eceran Rp30.000/liter.

Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga di wilayah hulu tidak hanya berasal dari harga komoditas di daerah asal, tetapi sangat dipengaruhi oleh

panjangnya rantai distribusi, keterbatasan kapasitas angkutan, kondisi sungai dan meningkatnya biaya logistik.

Risiko ke depan

Risiko yang perlu diantisipasi meliputi:

1. Berlanjutnya kemarau dan rendahnya muka air sungai;
2. Gangguan transportasi dan distribusi barang;
3. Penurunan stok di wilayah hulu;
4. Kenaikan biaya distribusi;
5. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi;
6. Potensi kelangkaan apabila gangguan pasokan berlangsung lama;
7. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah;
8. Tingginya disparitas harga antarwilayah;
9. Keterbatasan alternatif transportasi menuju Long Apari dan Long Pahangai.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan perkembangan Triwulan III Tahun 2026, permasalahan utama pengendalian inflasi di Kabupaten Mahakam Ulu adalah:

1. Gangguan distribusi akibat kekeringan fluvial

Kemarau panjang menyebabkan muka air Sungai Mahakam turun sehingga mengganggu transportasi sungai. Kondisi ini secara langsung memengaruhi kemampuan distribusi barang menuju wilayah hulu.

Permasalahan tersebut bahkan telah menjadi dasar penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan Fluvial di Long Apari dan Long Pahangai.

2. Ketergantungan terhadap transportasi sungai

Untuk wilayah tertentu menuju Long Apari, belum tersedia badan jalan darat yang terbuka. Masyarakat masih mengandalkan ces atau ketinting dengan kapasitas angkutan relatif terbatas, sekitar maksimal 200 kg.

3. Keterbatasan stok di wilayah hulu

Kondisi stok Long Apari pada Juli 2026 hanya diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan sekitar satu minggu. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah hulu memiliki buffer stok yang terbatas ketika distribusi terganggu.

4. Tingginya biaya distribusi

Pada kondisi kemarau ekstrem, terjadi tambahan biaya akibat keterbatasan kapasitas angkutan, perubahan pola perjalanan dan semakin sulitnya akses menuju wilayah hulu.

Kondisi tersebut menyebabkan adanya kesenjangan antara biaya distribusi aktual dengan biaya angkutan dalam kondisi normal.

5. Belum tersedianya cadangan pangan daerah secara permanen

Kabupaten Mahakam Ulu belum memiliki cadangan pangan yang tersimpan secara permanen dalam gudang pangan khusus. Dalam kondisi gangguan distribusi, daerah masih membutuhkan dukungan cadangan pangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

6. Belum optimalnya konektivitas darat

Terdapat ruas kritis sekitar 24,4 km Long Pakaq–Tiong Ohang yang mengalami hambatan akibat longsoran. Selain itu, akses dari Tiong Ohang menuju Naha Tifab, Naha Silat dan Long Apari belum memiliki badan jalan yang terbuka.

7. Kualitas data harga belum konsisten

Kinerja pengolahan data Mahakam Ulu masih mengalami fluktuasi. Pada minggu keempat Agustus tercatat hanya 25%, sedangkan pada minggu pertama September meningkat menjadi 100%. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kesinambungan pengumpulan data harga.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam menghadapi tekanan harga dan gangguan distribusi selama Triwulan III Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemantauan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok

Pemantauan dilakukan secara berkala terhadap harga, stok dan kondisi distribusi kebutuhan pokok di kecamatan serta melalui data LAMINETAM/PIHPS.

Pemantauan lapangan menjadi dasar untuk menentukan wilayah yang memerlukan intervensi, terutama wilayah dengan tekanan harga dan risiko kekurangan pasokan.

2. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM)

OPM dan GPM dilaksanakan sebagai instrumen jangka pendek untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, terutama pada wilayah yang mengalami tekanan harga dan hambatan distribusi.

Pelaksanaan intervensi tersebut menjadi semakin penting ketika terjadi gangguan distribusi akibat kemarau. Pemerintah daerah juga terus menyesuaikan sasaran intervensi berdasarkan kondisi harga, stok dan akses masing-masing wilayah.

3. Fasilitasi pangan melalui kerja sama dengan Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi

Dalam rangka memperkuat ketersediaan pangan, Kabupaten Mahakam Ulu memperoleh:

- fasilitasi distribusi GPM sebanyak 5 ton dari Bank Indonesia;
- fasilitasi distribusi OPM sebanyak 4 ton dari Disperindagkop Provinsi Kalimantan Timur;
- dukungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 52 ton untuk Kabupaten Mahakam Ulu;
- dukungan dari Baznas Kaltim sebanyak 10 ton Beras untuk masyarakat Mahakam Ulu yang terdampak kemarau panjang

Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan masyarakat di tengah gangguan distribusi akibat kemarau panjang.

4. Pelaksanaan kebijakan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggunakan kebijakan SOA Barang sebagai salah satu instrumen untuk membantu mengurangi beban biaya distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Kebijakan tersebut semakin relevan pada kondisi kemarau karena tambahan biaya angkutan muncul akibat penurunan muka air sungai, keterbatasan kapasitas angkut dan perubahan pola perjalanan.

5. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait

Pemerintah Kabupaten terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Pusat, BULOG dan instansi terkait untuk menjaga pasokan dan mencari solusi terhadap hambatan distribusi.

Koordinasi tersebut diperlukan karena persoalan distribusi Mahakam Ulu berkaitan dengan geografis, infrastruktur, transportasi dan konektivitas yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah kabupaten secara sendiri.

6. Penetapan Status Siaga Darurat Kekeringan Fluvial

Sebagai respons terhadap kondisi yang semakin mengganggu transportasi dan distribusi, Bupati Mahakam Ulu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan Fluvial di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai pada 19–25 Agustus 2026.

Keputusan tersebut menjadi dasar untuk melakukan langkah penanggulangan secara terpadu dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait.

7. Upaya membuka akses distribusi alternatif

Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi melalui UPTD PUPR untuk mendukung mobilisasi alat berupa motor grader dan alat pemadat.

Penanganan diarahkan pada ruas kritis Long Pakaq–Tiong Ohang sepanjang kurang lebih 24,4 km yang mengalami hambatan akibat longsoran. Apabila akses tersebut dapat dibuka kembali, mobilitas barang dan masyarakat menuju Tiong Ohang akan lebih mudah.

8. Penguatan gudang salur dan cadangan pangan

Pemerintah Kabupaten mengupayakan pemanfaatan bangunan yang tersedia, termasuk gudang arsip, sebagai tempat salur/penyimpanan sementara dengan pola in–out.

Konsep tersebut bukan sebagai gudang permanen, tetapi sebagai buffer distribusi agar barang yang masuk dapat segera disalurkan dan stok kemudian diisi kembali. Dalam jangka panjang tetap diperlukan sarana pergudangan dan cadangan pangan yang lebih permanen.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pemantauan harga dan stok

Pemantauan telah memberikan informasi mengenai perkembangan harga dan kondisi stok, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi.

Namun, fluktuasi kinerja pengolah data menunjukkan bahwa konsistensi dan ketepatan waktu data masih perlu diperbaiki.

2. OPM dan GPM

OPM dan GPM memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Namun, kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan intervensi jangka pendek. Kegiatan pasar murah tidak dapat menggantikan distribusi reguler karena kebutuhan masyarakat berlangsung setiap hari.

3. Dukungan pangan dari BI dan Pemerintah Provinsi

Fasilitasi GPM 5 ton dari BI dan dukungan CPPD Provinsi Kaltim 52 ton memberikan tambahan pasokan yang penting bagi Mahakam Ulu.

Dukungan tersebut menjadi semakin strategis dalam kondisi ketika distribusi reguler mengalami hambatan akibat kemarau.

Namun, dukungan pangan tetap perlu diikuti dengan sistem distribusi dan penyimpanan yang baik agar bantuan dapat sampai kepada wilayah yang paling membutuhkan.

4. SOA Barang

SOA Barang merupakan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik geografis Mahakam Ulu karena biaya logistik merupakan salah satu komponen penting pembentuk harga.

Namun, kondisi kemarau ekstrem menunjukkan bahwa biaya distribusi aktual dapat jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi normal, sehingga efektivitas dukungan perlu terus dievaluasi berdasarkan kondisi lapangan.

5. Ketahanan pangan dan sistem pergudangan

Kondisi di Long Apari menunjukkan bahwa ketika distribusi terganggu, stok dapat cepat mengalami tekanan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan daerah bukan hanya persoalan tersedianya barang, tetapi juga kemampuan menyimpan dan mendistribusikan barang sampai kepada masyarakat.

6. Konektivitas

Upaya membuka akses Long Pakaq–Tiong Ohang merupakan langkah mitigasi yang positif, tetapi belum menyelesaikan persoalan konektivitas sampai ke Naha Tifab, Naha Silat dan Long Apari.

Karena itu, alternatif distribusi yang ada saat ini belum dapat sepenuhnya menggantikan ketergantungan terhadap transportasi sungai.

Kesimpulan evaluasi

Secara umum, kebijakan pengendalian inflasi selama Triwulan III telah memberikan respons terhadap tekanan harga dan gangguan distribusi. Namun, kejadian kemarau fluvial memperlihatkan bahwa persoalan utama Mahakam Ulu masih bersifat struktural, yaitu:

> ketergantungan terhadap transportasi sungai → kapasitas angkut terbatas ketika sungai surut → biaya distribusi meningkat → stok wilayah hulu menipis → harga meningkat.

Dengan demikian, intervensi harga perlu tetap dilakukan, tetapi harus berjalan bersamaan dengan penguatan sistem logistik dan ketahanan pangan daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Triwulan III Tahun 2026, rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan adalah:

1. Memperkuat pemantauan harga, stok dan distribusi

Monitoring perlu dilakukan secara rutin dan tepat waktu, terutama di Long Apari dan Long Pahangai sebagai wilayah yang memiliki tingkat kerentanan distribusi tinggi.

Data yang dikumpulkan tidak hanya harga, tetapi juga:

- stok;
- sumber pasokan;
- moda transportasi;
- biaya angkut;
- waktu tempuh;
- kondisi jalur distribusi.

2. Menetapkan wilayah prioritas intervensi

OPM/GPM perlu diarahkan berdasarkan kondisi aktual, terutama:

harga tinggi + stok rendah + akses sulit + biaya distribusi tinggi.

Dengan demikian, intervensi tidak hanya berdasarkan jadwal, tetapi berdasarkan tingkat kebutuhan dan risiko.

3. Memperkuat fasilitasi pangan

Kerja sama dengan Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu terus diperkuat untuk mendukung GPM dan CPPD, terutama pada saat terjadi gangguan pasokan.

4. Mengoptimalkan SOA Barang

Pelaksanaan SOA perlu mempertimbangkan kondisi distribusi aktual, termasuk ketika terjadi:

- penurunan muka air sungai;
- pengurangan kapasitas angkutan;
- perubahan rute;
- peningkatan biaya perjalanan.

Dengan demikian, SOA dapat lebih responsif terhadap kondisi geografis dan perubahan biaya logistik.

5. Memperkuat cadangan pangan daerah

Kabupaten Mahakam Ulu perlu membangun sistem cadangan pangan yang lebih permanen sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan ketika terjadi gangguan distribusi.

6. Mempercepat penguatan sarana pergudangan

Kerja sama dengan BULOG perlu terus didorong, termasuk penetapan/pemilihan lokasi gudang BULOG di Kabupaten Mahakam Ulu.

Sementara gudang permanen belum tersedia, konsep gudang salur dengan pola in–out dapat dikembangkan sebagai solusi sementara.

7. Memperkuat konektivitas darat

Penanganan ruas Long Pakaq–Tiong Ohang ±24,4 km perlu terus didorong dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dalam jangka panjang, konektivitas darat perlu diperkuat agar distribusi tidak terlalu bergantung pada kondisi muka air Sungai Mahakam.

8. Mengembangkan produksi pangan lokal

Pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan perlu diperkuat sebagai strategi mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

9. Meningkatkan peran pelaku usaha lokal

BUMDes/BUMK, koperasi dan pelaku usaha lokal perlu didorong untuk terlibat dalam distribusi, penyimpanan dan pemasaran hasil produksi lokal sehingga rantai pasok dapat menjadi lebih pendek dan adaptif.

10. Membangun sistem peringatan dini distribusi

Kondisi muka air sungai perlu menjadi salah satu indikator awal dalam pengendalian pangan.

Muka air turun → evaluasi kapasitas angkut → cek stok → hitung kebutuhan → siapkan distribusi/intervensi.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat melakukan tindakan sebelum stok kritis dan harga meningkat terlalu tinggi.

Kesimpulan

Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan bahwa tekanan harga di Kabupaten Mahakam Ulu sangat berkaitan dengan kondisi distribusi dan konektivitas, terutama akibat kemarau panjang dan kekeringan fluvial.

Kondisi tersebut telah menyebabkan gangguan transportasi sungai, keterbatasan kapasitas angkutan, penurunan stok dan peningkatan harga di wilayah hulu. Kondisi Long Apari menunjukkan tingkat kerentanan yang paling tinggi karena belum memiliki akses jalan darat yang terbuka secara utuh dan masih sangat bergantung pada transportasi sungai.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan berbagai langkah melalui pemantauan harga dan stok, OPM/GPM, fasilitasi GPM 5 ton dari Bank Indonesia, dukungan CPPD Provinsi Kalimantan Timur 52 ton, dukungan bantuan beras 10 ton dari Baznas Kaltim, SOA Barang, koordinasi lintas pemerintahan, penguatan gudang salur, serta penanganan konektivitas.

Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan Fluvial pada 19–25 Agustus 2026 menjadi penegasan bahwa gangguan distribusi pada Triwulan III merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan terpadu.

Arah kebijakan ke depan perlu difokuskan pada tiga hal utama: menjaga pasokan dalam jangka pendek, menurunkan kerentanan biaya distribusi, dan membangun sistem logistik serta cadangan pangan yang lebih kuat dalam jangka panjang.